

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi menjadi tolak ukur akan kesejahteraan hidup manusia di setiap negara, karena kehidupan manusia di muka bumi ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi. Dalam konteks inilah, diperlukan pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi yang bermuara pada kebijakan ekonomi khususnya kebijakan fiskal di suatu negara.¹

Di negara-negara dengan mayoritas umat muslim seperti Indonesia, Pakistan, Mesir, Turki, dll, pemikiran ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran ekonomi muslim di masa lalu. Pemikiran ekonomi tokoh-tokoh muslim selalu menjadi pedoman karena pemikiran tokoh-tokoh muslim yang kritis terhadap permasalahan masyarakat. Hal ini disebabkan karena *worldview* (pandangan hidup) keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan permasalahan.²

¹ Mukhoer Abdus Syukur, Skripsi: *"Kebijakan Fiskal Umar bin Abdul Aziz*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 1.

² Nur Chamid, *Jejak langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 104.

Bila dilihat dari catatan sejarah dan pemikiran-pemikiran ekonomi terdahulu, maka kita akan melihat banyaknya nama tokoh muslim yang pemikirannya sangat langka dipakai.³ Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah para Khulafaur Rasyidin, yang jika ditelusuri beberapa pandangan mereka terhadap ekonomi dipandang sangat bijak dan cerdas, namun pemikiran-pemikiran mereka seperti diabaikan dan nyaris dilupakan.⁴

Salah satu Khulafaur Rasyidin yang pemikiran ekonominya fenomenal adalah Umar bin Khattab dari golongan suku Quraisy. Umar bin Khattab merupakan putera dari Nufail al-Quraisy, dari suku Bani Aidi. Masa pemerintahan Umar bin khattab merupakan masa emas bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam, meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih sepuluh tahun. Umar membawa kejayaan Islam di bawah pemerintahannya dan sukses mensejahterakan masyarakatnya berkat kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Prestasi yang dicapai mencakup banyak bidang, seperti perluasan wilayah, penataan administrasi negara, keamanan dan ketertiban masyarakat, bidang

³ M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2003), hlm. 3.

⁴ Mukhoer Abdus Syukur, *Op. Cit.*, hlm. 2.

perekonomian dan sebagainya.⁵

Selama Umar memimpin pemerintahan, ia banyak mengeluarkan kebijakan dalam upaya untuk mensejahterakan rakyatnya. Salah satu yang paling diingat adalah pembangunan lembaga Baitul Maal. Al-Mawardi mengatakan bahwa Baitul Maal adalah semacam pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Tiap hak yang wajib dikeluarkan untuk kepentingan kaum muslimin maka hak tersebut berlaku untuk Baitul Maal, maka harta tersebut telah menjadi bagian dari pengeluaran Baitul Maal, baik dikeluarkan dari kasnya maupun tidak.⁶

Baitul Maal adalah lembaga keuangan negara yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan ketentuan syari'at. Baitul Maal dapat disamakan dengan kas negara.⁷

Pada Masa Umar sumber-sumber pendapatan negara semakin

⁵ Abbas Mahmud Al-Akkad, *Abqariyatu Umar*, Terj. Gazirah Abdi Ummah, "kejeniuasan Umar", (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), hlm. 95) dalam Ridwan, "Telaah Pemikiran Huku m Progresif Umar bin Khatab Perspektif Indonesia", Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 13 No.1, 2018, hlm. 35.

⁶ Al-Mawardi, Abu al-Husain Ali Ibn Muhammad, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Dar al-Fikr, 1960), cet. Ke-1, hlm. 213 dalam Irna Fianda, Skripsi: "Kepemimpinan Umar bin Khatab dalam Pemberantasan Kemiskinan di Kota Madinah", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016), hlm. 66.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 1996), hlm. 901.

bertambah. Dia mulai mengembangkan sistem keuangan dan mengangkat pegawai yang digaji untuk mengurus lembaga tersebut.⁸ Pada masa ini pendapatan negara mengalami peningkatan dan Baitul Maal difokuskan dan didirikan secara permanen di pusat kota dan ibukota provinsi.⁹

Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membagi pendapatan (devisa) negara dan pendistribusian pendapatan negara (belanja negara) menjadi empat bagian, seperti pada tabel di bawah:

Tabel 1.1
Devisa dan Belanja Negara di Masa Umar bin Khattab

Pendapatan Negara	Tujuan Penggunaan
<i>Zakat dan Ushur</i>	Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Maal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf.
<i>Ghanimah</i> dan Sedekah	Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang Muslim atau bukan.
<i>Kharaj, Fa'i, Jizyah, Ushur</i> dan Sewa Tanah	Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk membiayai biaya

⁸ Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), hlm. 358 dalam Muhammad Fauzan, “Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab”, Human Falah. Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 52.

⁹ *Ibid.*, hlm. 52.

	operasional administrasi kebutuhan militer, dan sebagainya.
Pendapatan lain-lain.	Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya

Sumber: Adiwarmar Karim, 2008

Keberadaan Baitul Maal pada zaman Umar bin Khattab sangat dirasakan keberadaannya. Oleh karena itu, Umar memerintahkan untuk mendirikannya sebagai lembaga keuangan Muslimin yang menopang perekonomian untuk kemaslahatan masyarakatnya. Lembaga ini dapat dianalogikan seperti Kementerian Keuangan di zaman sekarang, sedangkan pimpinan pengelolaannya seperti Menteri keuangan di Indonesia.¹⁰

Berbeda dengan pemerintahan pada masa Umar bin Khattab, Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam nya, banyak terjadi permasalahan-permasalahan ekonomi yang melahirkan krisis ekonomi berkepanjangan. Krisis yang bermula dari kemerosotan nilai tukar rupiah dan penanganan yang lambat sejak awal menyebabkan krisis ekonomi menyentuh ke hampir

¹⁰ Ali Fikri, Skripsi: “*Wawasan Islam dan Ekonomi Sebuah Bunga Rampai*”, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), hlm. 208.

semua aspek perekonomian.¹¹

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan presentase angka kemiskinan naik menjadi 9,78 persen pada maret 2020. Dengan angka kemiskinan mencapai 26,42 juta.¹² Permasalahan kemiskinan bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan di Indonesia. Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2020 meningkat menjadi 413,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 6.076,9 triliun (kurs Rp 14.700).¹³ Besarnya presentase angka kemiskinan dan juga utang negara melahirkan krisis berkepanjangan di Indonesia. Krisis ini dinilai akan terus bertambah dan semakin mengkhawatirkan. Krisis ini disebabkan karena peran dan kebijakan pemerintah yang tidak terarah dan terkesan lemah. Kurs mata uang rupiah yang semakin menurun, ditambah dengan krisis energi yang melingkupi masyarakat.¹⁴ Akibatnya, krisis ekonomi khususnya masalah kemiskinan merupakan kajian yang tidak pernah berhenti.

¹¹ Faisal H. Basri, *Perekonomian Indonesia (tantangan dan harapan bagi kebangkitan ekonomi Indonesia)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga 2002), hlm. 1.

¹² Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020 No.56*. (diakses pada 15 Juli 2020 pukul 17.44 di laman <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>).

¹³ Bank Indonesia, www.bi.go.id

¹⁴ M. Nazori Majid, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

Indonesia memiliki agenda yang tiap tahun selalu rutin dilakukan yaitu membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Dalam catatan APBN yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, pendapatan (devisa) dari negara Indonesia yang paling besar tiap tahunnya adalah bersumber dari pajak. Seperti yang dapat dilihat dari data APBN tahun 2018, 2019, dan 2020 berikut.

Tabel 1.2
Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2018 dan 2019
(Triliun Rupiah)

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
Pendapatan Dalam Negeri	Rp 1.894,7	Rp 2.165,1	Rp 2.233,2
A. Penerimaan dalam Negeri	Rp 1.893,5	Rp 2.164,7	Rp 2.232,7
1. Penerimaan Perpajakan	Rp 1.618,1	Rp 1.786,4	Rp 1.865,7
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 275,4	Rp 378,3	Rp 367,0
B. Penerimaan Hibah	Rp 1,2	Rp 0,4	Rp 0,5
Belanja Negara	Rp 2.220,7	Rp 2.461,1	Rp 2.540,4
A. Belanja Pemerintah Pusat	Rp 1.454,5	Rp 1.634,3	Rp 1.683,5
B. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Rp 766,2	Rp 826,8	Rp 856,9

Sumber: Informasi APBN 2018-2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Sumber Pendapatan terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Hal ini tentu sangat

berbeda dengan pemerintahan pada masa Umar bin Khattab yang mana sumber pendapatan terbesar bersumber dari Zakat.¹⁵

Perbedaan yang terjadi bukan hanya dalam pendapatan negara saja. Dalam hal belanja negara Indonesia juga memiliki perbedaan dengan belanja negara pada masa Umar bin Khattab. Yaitu perbedaan mendasar terkait pos perbendaharaan harta negara. Di zaman Umar, pos perbendaharaan negara dipisahkan sesuai pendapatan dan dikeluarkan sesuai kekhususan tujuan pendistribusian yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang dapat dilihat dari tabel devisa dan belanja negara di masa Umar bin Khattab. Sedangkan Pemerintahan Indonesia menggabungkan seluruh pendapatan dan mengeluarkannya sesuai perencanaan APBN seperti yang dapat dilihat pada tabel pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan kementerian keuangan.

Perbedaan tersebut tentu membuat tanda tanya besar mengapa Kebijakan Fiskal di masa Umar bin Khattab efektif dilakukan sedangkan di Indonesia tidak. Ketidakefektifan itu dapat dilihat dari pendapatan negara yang belum mampu memenuhi kebutuhan Belanja pemerintah dimana selalu terjadi defisit

¹⁵ Nurma Sari, “Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifahan Umar bin khattab”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1 No. 2, September 2015, hlm. 178.

anggaran di beberapa tahun terakhir sedangkan pada masa Umar bin Khattab defisit anggaran sangat jarang terjadi.¹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan data APBN pada Mei 2020 yang menyebutkan bahwa ada penurunan sebesar 9% pada Mei 2020 dari pendapatan pajak dan non pajak. Perbedaan juga dapat dilihat dari Hal ini jelas membuktikan bahwa kebijakan fiskal di masa sekarang tidak berjalan dengan baik dan menunjukkan grafik yang tidak stabil.

Kebijakan fiskal di Indonesia tidak berjalan dengan baik seperti pada pemanfaatan Baitul Maal yang mengangkat perekonomian pada masa Umar, padahal jika diteliti lagi Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas muslim terbesar yang bisa sangat mencontoh atau menjadikan pedoman setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari APBN. Pada masa Umar bin Khattab sistem APBN yang dikeluarkan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis serta ijtihad-ijtihad yang dilaksanakan beserta sahabat-sahabat lainnya. Sedangkan pada sistem APBN di Indonesia tidak sepenuhnya berpedoman pada Al-Qur'an dan

¹⁶ Rizal Fahlevi, "*Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*", JURIS, Vol.13 No. 2, Desember 2014, hlm 136.

Hadis.¹⁷ Jika saja kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab diberlakukan di Indonesia bukan tidak mungkin kemiskinan bisa dihapuskan dan perekonomian negara Indonesia meningkat.

Berdasarkan dari persoalan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui permasalahan lebih dalam dengan melakukan penelitian dalam bentuk karangan ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB TENTANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran ekonomi Umar bin Khattab tentang kebijakan fiskal?
2. Bagaimana relevansi kebijakan fiskal menurut pemikiran ekonomi Umar Bin Khattab tentang kebijakan fiskal di Indonesia?

¹⁷ Muhammad Fauzan, *Op. Cit.*, hlm. 55.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari topik, maka penulis membatasi permasalahan pada **“ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB TENTANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA”**.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana pemikiran ekonomi Umar bin Khattab tentang kebijakan fiskal.
- b. Mengetahui bagaimana relevansi kebijakan fiskal menurut pemikiran ekonomi Umar Bin Khatab terhadap kebijakan fiskal di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, menambah wawasan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan memperoleh pengetahuan tentang kebijakan fiskal menurut pemikiran ekonomi

Umar bin Khattab terhadap kebijakan fiskal di Indonesia.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemangku kebijakan untuk memaksimalkan pendapatan dan pengeluaran keuangan agar dapat efektif untuk kemaslahatan.
- c. Bagi akademisi, memberikan tambahan referensi bagi keputakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya. Serta dapat dijadikan sumber informasi bagi penelitianberikutnya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian keputakaan (*library research*) artinya penelitian yang digunakan menggunakan penelusuran karya-karya ilmiah, baik dari buku, majalah, jurnal, koran, makalah, internet, undang-undang dan literatur lainnya.¹⁸ Yaitu semua yang berkaitan dengan pemikiran Umar bin Khattab yang dikhususkan pada pemikiran ekonomi Umar bin khattab terhadap kebijakan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

fiskal dan relevansinya di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari wawancara narasumber yang memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam klasik, tentang kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Narasumber berasal dari Guru Besar Ekonomi Pembangunan Islam, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada pusat Perancangan UU Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Akademisi Bidang Politik Islam/Pengamat Kebijakan Politik Timur tengah, Ajun Jaksa/Kasubsi Pertimbangan Hukum Perdata Kejaksaan Negeri Kab. Sumedang, Akademisi Bidang Hukum Ekonomi Syariah/ Anggota dewan Syariah Nasional MUI Provinsi Sumatera Selatan, Hakim Peradilan Agama Bersertifikasi Ekonomi Syariah, dan Pegawai Pelaksana Bal Kanwil Bea masuk Sumatera bagian barat. buku-buku bacaan, literatur ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini buku-buku yang mengkaji pemikiran Umar bin Khattab.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari buku-buku bacaan, literatur ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini buku-buku yang mengkaji pemikiran Umar bin Khattab.

3. Metode Analisis data

Metode Analisis data penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan teknik-teknik perpaduan antara *library resaerch* dan pandangan dari narasumber, yaitu dengan cara mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara. Proses dalam penelitian ini meliputi penggambaran dan pembahasan hasil pengamatan serta wawancara yang diperoleh, melakukan analisa, menyimpulkan hasil penelitian dan memberikansaran.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi tersusun dengan sistematis dan mempermudah pembahasan maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas, batasan permasalahan dalam penelitian, tujuan, manfaat pelaksanaan penelitian dan metodologi penelitian

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang Kebijakan Fiskal yang meliputi pengertian Kebijakan Fiskal, Fungsi Kebijakan Fiskal, Instrumen Kebijakan Fiskal, Bentuk Kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab meliputi Instrumen Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab.

BAB III : BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB

Bab ini berisi tentang biografi Umar bin Khattab.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya tentang Pemikiran Ekonomi Umar bin Khattab tentang Kebijakan Fiskal dan Relevansinya di Indonesia dan data yang didapatkan dari penelitian serta analisisnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah serta saran terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat penulis.